

GENDER DAN POLITIK; ANALISIS KEMENANGAN ADE UU SUKAESIH DALAM PILKADA BANJAR 2013

**Wiwi Widiastuti
Fitriyani Yuliawati**

Universitas Siliwangi Tasikmalaya Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya
wiwi.widiastuti@unsil.ac.id
fitriyaniyuliawati@unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian yang berjudul Gender Dan Politik: Analisis Kemenangan Ade Uu Sukaesih Dalam Pilkada Banjar 2013 dimaksud untuk menganalisis kemenangan Ade Uu Sukaesih dalam Pilkada di Kota Banjar tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling melalui metode wawancara mendalam.

Kemenangan Ade Uu Sukaesih dalam Pilkada Kota Banjar tahun 2013 dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu sosok dokter Herman sebagai tokoh yang membumi di Kota Banjar yang menjabat dua kali periode Wali Kota Banjar sekaligus suami dari Ade Uu Sukaesih, serta Sosok Ade Uu Sukaesih sebagai Istri Mantan wali kota yang dianggap berhasil mendampingi dokter Herman dalam mengembangkan tugasnya selama dua periode. Temuan tersebut menunjukkan pengaruh dominan dokter Herman dalam kemenangan istrinya, yaitu Ade Uu Sukaesih, yang menunjukkan pengaruh budaya patriarkis terhadap kemenangan calon perempuan dalam pilkada dan maskulinitas dalam kontestasi politik lokal.

Kata Kunci: gender, politik, pilkada

Abstract

The study, entitled Gender and Politics: Analysis victory Ade Uu Sukaesih In Banjar elections in 2013 intended to analyze the Uu Sukaesih Ade victory in the elections in Banjar 2013. This study used qualitative research methods Descriptive using purposive sampling techniques of data collection through in-depth interviews.

Ade Uu Sukaesih victory in the elections of Banjar in 2013 was influenced by two important factors that figure doctor Herman as a character grounded in Banjar, who served two terms Mayor Banjar well as the husband of Ade Uu Sukaesih. Besides figure Ade Uu Sukaesih as Former mayor's wife who is considered successful in assisting physicians Herman elicits task during the two periods. From the results of these studies are still visible influence physician Herman in his victory that her wife, Ade Uu Sukaesih, shows the influence of patriarchal culture against women candidates win in the local elections and masculinity of contestation in local politics.

Keywords: gender, politics, local elections

Perempuan menjadi pemimpin pada era Soeharto bisa dikatakan sebagai hal yang hampir tidak mungkin terjadi. Hal ini terjadi karena masih sangat lekatnya budaya patriarkis di Indonesia. Pada saat itu tidak ada satupun daerah yang dipimpin oleh

seorang perempuan, bahkan banyak sekali jabatan-jabatan strategis yang ditempati oleh laki-laki.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat rendah, bahkan bisa

dikatakan tidak ada. Minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta rendahnya pendidikan politik menjadi salah satu penyebab rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik.

Pada era Reformasi pada awal 1999an telah terjadi perubahan dalam berbagai bidang, salah satunya tentang bagaimana perempuan bisa menjadi seorang pemimpin, terutama setelah Megawati menjadi Presiden RI. Hal ini membuktikan terbukanya kemungkinan bagi seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin bahkan dalam tingkatan yang paling tinggi sebagai Presiden.

Peluang tersebut juga hadir melalui UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sebagai revisi UU No.22 tahun 1999, yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menetapkan model pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat (pasal 56 ayat 1), hal ini menguatkan Pilkada langsung sebagai konsekuensi politik dari disepakatinya UU tersebut. Sebelumnya telah disepakati UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Legislatif, yang pada prinsipnya tidak lagi memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada 1 juni 2005 Pilkada langsung dilaksanakan di Kutai Kartanegara dan tidak terdapat calon perempuan. Pada Pilkada-Pilkada selanjutnya, perempuan

yang menjadi kandidat dalam Pilkada masih sangat minim. Pada 11 Nopember 2006 dan periode berikutnya, Ratu Atut Chosiyah menjadi perempuan pertama yang memenangkan Pilkada pada Provinsi Banten.

Kota Banjar sebagai salah satu daerah yang telah melaksanakan Pilkada berlangsung pada tanggal 28 agustus 2013 dan diikuti oleh lima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota (Maman-Wawan Ruswandi, Ijun Junasah-M Sodiq, Rusli-Wawan, Ade UU Sukaesih-Darmadji dan Akhmad Dimiyati-Abdurrohim). Pilkada ini menarik untuk diteliti karena pasangan Ade UU Sukaesih dan Darmadji memenangkan Pilkada dengan lebih dari 70% suara, Pilkada yang dimenangkan oleh kandidat perempuan dengan raihan suara yang cukup fenomenal.

Posisi Ade UU sukaesih sebagai istri mantan Wali Kota Banjar banyak dianggap sebagai faktor yang memudahkan Ade UU Sukaesih memenangkan Pilkada Banjar. Kenyataan itu membuat penelitian lebih lanjut tentang kemenangan Ade UU sukaesih dilihat dari sisi gender dan politik menjadi relevan. Dari latar belakang permasalahan diatas maka permasalahan yang akan dibahas yaitu analisis kemenangan Hj. Ade Uu Sukaesih -Darmadji Prawirasetia pada PILKADA Kota Banjar tahun 2013.

Tinjauan Pustaka

Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung lahir setelah otonomi daerah

bergulir di Indonesia. Melalui UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaiki melalui UU no. 12 Tahun 2008 sebagai payung hukum pemilihan kepala daerah secara langsung. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan yuridis pelaksanaan Pilkada langsung yang pertama dalam sejarah politik Indonesia. Sesungguhnya Pilkada langsung dapat diintrodusir dalam pelaksanaan pasal 23 UU No. 1/1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Namun sampai dicabut tidak lahir UU tentang pilkada langsung untuk menindaklanjuti penjelasan pasal 23 UU tersebut. UU No. 1/1957 digunakan pada sistem federasi berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia sementara (RIS) dengan UU sementara 1950 sedangkan UU No. 32/2004 lahir dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

David Easton dalam Buku Pemilihan Kepala Daerah Langsung (2005: 200) menyatakan bahwa suatu sistem selalu memiliki sekurangnya tiga sifat yaitu; (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling bergantung; (3) mempunyai perbatasan yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain. Sebagai suatu sistem seperti yang dikemukakan oleh David Easton, sistem Pilkada langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder dan sub-sub sistem. Bagian-bagian tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral proses*, dan *electoral law enforcement*. *Electoral*

regulation adalah segala ketentuan atau aturan mengenai Pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. *Electoral process* dimaksudkan seluruh kegiatan terkait secara langsung dengan Pilkada yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun teknis. *Electoral law enforcement* atau penegakan hukum terhadap aturan-aturan Pilkada baik politis, administrasi ataupun pidana. Ketiga, bagian Pilkada langsung tersebut sangat menentukan sejauh mana kapasitas sistem dapat menjembatani pencapaian tujuan dari proses awalnya. Masing-masing bagian tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan suatu kesatuan utuh yang komplementer.

Kepala daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Istilah jabatan publik mengandung pengertian bahwa kepala daerah mengambil kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat, berdampak kepada kehidupan rakyat, dan dirasakan oleh rakyat. Oleh sebab itu, kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan kepada rakyat. Adapun dalam jabatan politik terkandung maksud bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan dengan mekanisme politik, yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik

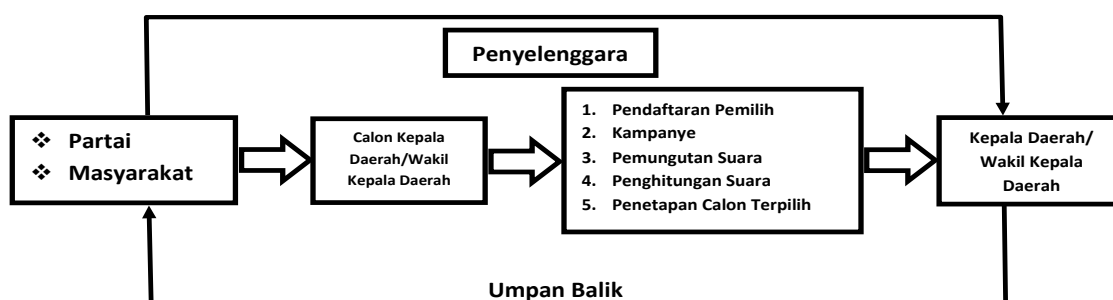
seperti rakyat dan partai-partai politik.

Joko J. Prihatmoko (2005:204) menyatakan bahwa aktor utama dalam Pilkada langsung adalah rakyat, partai politik, dan calon kepala daerah. Ketiga aktor terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian tahapan-tahapan pilkada langsung seperti; pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon pemilih. Kegiatan tahapan pilkada langsung tergambar dalam bagan sebagai berikut:

gender selama ini, sesungguhnya diskursus gender mempersoalkan terutama, hubungan sosial, kultural, hukum dan politik antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, satu hal yang harus ditegaskan bahwa pemikiran tentang gender, pada intinya hanya ingin memahami, mendudukkan dan menyikapi relasi laki-laki dan perempuan secara lebih proporsional dan lebih berkeadilan dalam relasi antara keduanya sebagai hamba Tuhan. Seperti tentang partisipasi politik yang menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008

Bagan 1.1

Model Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung



Sumber: Pemilihan Kepala Daerah langsung, Joko J. Prihatmoko hal. 206

Teori Gender

Istilah gender masih relatif baru dalam tradisi diskursus sosial, politik, hukum dan terutama agama di Indonesia. Di sisi lain, tema gender masih cenderung dipahami secara pejoratif. Banyak orang masih sangat antipati dan apriori terhadap istilah gender. Kata gender bernuansakan semangat pemberontakan kaum perempuan yang diadopsi dari nilai-nilai Barat yang tidak bermoral dan tidak religius.

Jauh dari apa yang sudah terlanjur dituduhkan banyak orang mengenai isu

tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30%, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir d Undang-Undang No. 10 tahun 2008, disebutkan bahwa penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan kaum perempuan pada kepengurusan partai politik pada tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan partai politik untuk selanjutnya dapat menjadi peserta pemilu. Dan Pasal 53 UU mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling

sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Konsep gender sendiri sebetulnya sangat sederhana walau ia sering dikaburkan dengan pengertian jenis kelamin. Masyarakat umumnya mengidentifikasikan gender dengan jenis kelamin (*sex*). Sebagai langkah awal perlu ditegaskan bahwa isu gender tidak dapat dipisahkan dari variabel jenis kelamin; bahkan gender secara sosiologis berawal dari perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah konsep biologis sebagai identitas kategorial yang membedakan laki-laki (*jantan*) dan perempuan (*betina*).

Identitas jenis kelamin dikonstruksikan secara alamiah, kodrati, yang merupakan pemberian distingtif yang kita bawa sejak lahir. Akibatnya, jenis kelamin bersifat tetap, permanen, dan universal. Sedangkan gender adalah seperangkat atribut dan peran sosial-kultural yang menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Tidak seperti jenis kelamin yang bersifat kodrati, gender dikonstruksikan secara sosial maupun kultural melalui proses sosial yang sangat dinamis. Sesuai dengan asal usulnya, pembentukan gender didasarkan pada espektasi nilai-nilai sosial dan kultural. Oleh sebab itu, gender dapat berubah (*changeable*) sewaktu-waktu seiring dengan perubahan dimensi ruang dan waktu.

Menurut Mansour Faqih (2010), gender dipengaruhi dan dibingkai oleh banyak hal. Komponen determinatifnya sangat variatif, seperti nilai-nilai budaya, tradisi agama, sosial dan sistem politik.

Gender dikonstruksi baik sengaja maupun tidak, disosialisasikan pertama kali melalui institusi keluarga, lingkungan sosial dan sekolah, kemudian dicarikan dasar penopang ideologisnya untuk menguatkan jenis perbedaan tersebut. Dalam kaitan di atas, teks dan doktrin keagamaan sering dijadikan sebagai tempat berlindung dan acuan utama untuk merumuskan pemikiran diskursif tentang gender.

Meski demikian perlu dicatat bahwa gender tidak semata-mata mempersoalkan perbedaan dan pembedaan *un sich* antara laki-laki dan perempuan; terlebih penting lagi ia menyangkut dominasi baik dari konteks relasi maupun distribusi kekuasaan. Kondisi inilah disadari atau tidak yang seringkali melahirkan dan melembagakan berbagai ketidakadilan gender.

Secara konseptual ketidakadilan yang berbasis gender sebagai sebuah bentuk refleksif pendefinisian dan pembakuan atas peran-peran yang berbeda (yang seringkali diskriminatif) pada laki-laki dan perempuan terhadap sesuatu yang didasarkan atas pembagian kerja menurut kategori jenis kelamin dan asumsi ideologi patriarki. Akibat kuatnya ideologi gender yang patriarkis yang berkembang di masyarakat ini, maka laki-laki dan perempuan tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan peran-peran sosial dan politik karena secara faktual ketidakadilan gender telah termanifestasikan dalam pelbagai bentuk keyataan sosial, budaya, ekonomi, politik dan agama.

Sementara itu menurut Masdar. F. Mas'udi (2002) ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat disebabkan oleh banyak faktor. Pada awalnya adalah disebabkan stereotype yang cenderung merendahkan posisi kaum perempuan, seperti perempuan itu lemah, lebih emosional daripada nalar, cengeng tidak tahan banting, tidak patut hidup selain di dalam rumah, dan sebagainya. Menurut Masdar. F. Mas'udi ada empat persoalan yang menimbulkan stereotype terhadap perempuan :

1. Melalui subordinasi, kaum perempuan harus tunduk kepada kaum laki-laki. Pemimpin (imam) hanya pantas dipegang oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya boleh menjadi yang dipimpin (ma'mum). Perempuan boleh menjadi pemimpin hanya terbatas pada kaumnya saja, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan utama kaum laki-laki, misalnya di Dharma Wanita, Muslimat, Aisyiah, Fatayat dan sebagainya.
2. Perempuan cenderung dimarginalkan, yaitu diposisikan dipinggir. Dalam kegiatan masyarakat, perempuan paling tinggi hanya menjadi seksi konsumsi atau penerima tamu saja. Dalam rumah tangga, perempuan adalah konco wingking di dapur.
3. Kaum perempuan berada dalam posisi yang lemah, karenanya kaum perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan (*violence*) oleh kaum laki-laki. Dalam masyarakat, bentuk kekerasan itu mulai

dari digoda, dilecehkan, dipukul, diceraikan sampai diperkosa.

4. Akibat ketidakadilan gender itu, kaum perempuan harus menerima beban pekerjaan yang lebih berat dan lebih lama daripada yang dipikul kaum laki-laki. Dalam bekerja, laki-laki paling aktif maksimal bekerja rata-rata 10 jam/hari, sedangkan perempuan bekerja 18 jam/hari. Pada umumnya beban ini dianggap remeh oleh kaum laki-laki, karena secara ekonomi dinilai kurang berarti.

Dengan demikian manifestasi ketidakadilan gender jika dirumuskan di dalam sektor kehidupan antara lain terdapat pada ;

1. Sektor Budaya, perempuan terkungkung dengan stereotype yang diletakkan pada dirinya untuk tidak keluar dari peran domestik. Stereotype ini akan berimplikasi pada ketabuan untuk dapat berpendidikan tinggi.
2. Sektor Domestik dan publik, perempuan akan selalu menjadi korban kekerasan
3. Sektor ekonomi, perempuan mengalami marginalisasi dan dipaksa berperan ganda
4. Sektor Politik, perempuan menjadi subordinasi dari kekuasaan laki-laki.

Mencermati fenomena di atas, menurut analisa Mansoer Faqih hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor antara lain:

1. Adanya arogansi laki-laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkembang secara maksimal.

2. Adanya anggapan laki-laki sebagai pencari nafkah utama.
3. Adanya kultur yang selalu memenangkan laki-laki yang telah mengakar di masyarakat.
4. Norma hukum dan kebijakan politik yang diskriminatif.
5. Perempuan sangat rawan perkosaan atau pelecehan seksual dan bila ini terjadi akan merusak citra dan norma baik di keluarga dan masyarakat, sehingga perempuan harus dikekang oleh aturan-aturan khusus yang memisahkan perempuan dalam tugas domestik saja.

Dengan demikian bisa dipahami bahwa terbentuknya perbedaan gender yang berakibat pada munculnya ketidakadilan gender tersebut dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial, budaya, melalui ajaran agama bahkan juga oleh negara. Melalui proses yang panjang tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang seolah-olah bersifat biologis dan tak bisa diubah lagi.

Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku serta penekanan pada aspek subjektif yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Metode ini langsung menunjuk *setting* dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan materi (Bogdan dan Taylor, 1992). Data

yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi (Sutopo, 1988).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel bertujuan (*purposive sampling*) dimana peneliti memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam (Goezt & Le Comple, 1984, dalam Heribertus Sutopo, 1988: 21-22) dengan demikian, pemilihan informan tidak ditekankan secara kuantitas, melainkan ditekankan pada kualitas pemahamannya terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian peneliti memperoleh data. Mengingat jumlah informan dapat berkembang hingga informasi yang dibutuhkan diperoleh, maka dalam hal ini peneliti juga akan melakukan penelitian dengan menggunakan teknik *snowball sampling*.

Peta Politik Kota Banjar

Kota Banjar belum genap 17 tahun tetapi dalam kepemimpinan Wali Kota Banjar dr. Herman Sutrisno, Kota Banjar sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat (Undang Sudrajad, 2012:195) ditandai dengan banyaknya penghargaan yang diperoleh oleh Kota Banjar.

Semangat Reformasi adalah awal eksisnya kembali pemberlakuan konsep Otonomi Daerah. Reformasi adalah langkah

awal semakin terbukanya komunikasi massa dan kebebasan pers. Pemerintah semakin membatasi kekuasaannya terhadap daerah dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan diperbaharui lagi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Pilkada langsung.

Sejalan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Kota Banjar sudah untuk ketiga kalinya menyelenggarakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota secara langsung. Terakhir pemilihan wali kota dan wakil wali kota diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2013. Pemilihan ini di ikuti oleh 5 pasangan calon yang terdiri dari 3 pasangan calon independen dan 2 pasangan calon yang di usung dari Partai Politik. Pasangan Ade Uu Sukaesih-Darmadji Prawirasetia bernomor urut 4 yang diusung Golkar, PKS, PPP, PKB, PAN, Gerindra, dan PKPI ini memperoleh suara terbanyak, 67,43%. Jumlah penduduk yang sudah memiliki hak pilih, data yang diperoleh dari KPU Kota Banjar menunjukkan 68412 pemilih laki-laki dan 70998 pemilih perempuan (KPU Kota Banjar, 2013)

Kota Banjar relatif memiliki peta politik monolitik. Dari 25 kursi DPRD, 8 kursi dimiliki Partai Golkar, empat partai lainnya: Partai Demokrat, PPP, PKS, dan PDIP hanya mampu meraih 3 kursi, PAN meraih 2 kursi, serta Partai Hanura, Gerindra, dan PKB masing-masing 1 kursi. Komposisi kepartaian ini menempatkan Partai Golkar satu-satunya partai yang dapat mengajukan pasangan calon wali kota-

wakil wali kota sendiri tanpa butuh koalisi dengan partai lainnya. Kondisi kepartaian ini menempatkan Partai Golkar di Kota Banjar menjadi begitu kuat sehingga dengan leluasa memainkan peran politik, termasuk mencegah terciptanya koalisi antar parpol lainnya.

Pemilukada sebagai model kontestasi politik dapat melahirkan dan menawarkan banyak alternatif dan ini dimanfaatkan oleh partai politik yang ada, termasuk mendorong jago-jago di partainya dalam kontestasi Pemilukada. Menyimak visi dan misi kelima pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Banjar ibarat memilih dan memilah pasir di padang pasir, sulit mencari pembedanya karena satu sama lain nyaris sama dan seragam. Karena itu, pemilih awam sejatinya merasa kesulitan menjatuhkan pilihan tanpa pembeda yang cukup bermakna, apakah pembeda dari latar ideologis, program, atau hanya emosional *like and dislike*.

Budaya Patriarki dan Analisis Kemenangan

Tanggal 28 Agustus 2013 telah dilaksanakan pesta rakyat untuk memilih Wali Kota Banjar. Dari lima pasangan calon yang tampil, hanya dua pasangan calon yang diusulkan partai politik, yaitu: pasangan Ade Uu Sukaesih-Darmadji Prawirasetia (Golkar, PKS, PPP, PKB, PAN, Gerindra, PKPI dan Demokrat) dan pasangan Akhmad Dimiyati–Muin Abdurrochim (PDIP-PBB). Tiga pasangan lainnya merupakan kandidat perseorangan, yakni: Maman

Suryaman-Wawan Ruswandi, Ijun Judasah-Mochammad Shoddiq, dan Herli Rusli Suyatin-Wawan Gunawan.

Sekilas tentang kelima pasangan calon bisa dipaparkan sebagai berikut:

1. Maman Suryaman-Wawan Ruswandi merupakan kombinasi antara pengusaha dan artis lokal. Pasangan ini punya potensi menjadi kuda hitam karena banyak menysar komunitas pasar dan pedagang.
2. Pasangan nomor urut dua, Ijun Judasah-Mochammad Shoddiq merupakan profesional. Profesi Ijun sebagai seorang dokter dan birokrat bisa saja mengingatkan publik Banjar pada keberhasilan dr. Herman sehingga dapat mendongkrak suaranya.
3. Pasangan nomor urut tiga, Herli Rusli Suyatin-Wawan Gunawan juga tidak bisa dianggap enteng. Latar profesi Herli Rusli sebagai tentara memiliki nilai tambah sendiri bagi warga Banjar. Namun sayangnya, kedua pasangan calon perseorangan ini tampak “ketinggalan *start*” sehingga memiliki waktu kampanye dan sosialisasi yang amat sempit. Karenanya, baik pasangan Ijun-Shoddiq maupun pasangan Herli-Wawan sangat berat untuk meraup dukungan publik.
4. Pasangan nomor urut empat, Ade Uu Sukaesih-Darmadji Prawirasetia merupakan kandidat yang paling siap. Karena mendapat dukungan banyak partai (Golkar, PKS, PPP, PKB, PAN, Gerindra, PKPI dan Demokrat).

Ternyata memang perolehan suara pasangan AdeUu-Darmadji melampaui angka 60 persen.

5. Kandidat nomor lima, terutama Akhmad Dimiyati (PDI-P) yang benar-benar merupakan “orang partai politik”. Karena dari sisi pengalaman politik-pemerintahan Akhmad Dimiyati pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Banjar sebelumnya.

Munculnya nama Ade Uu Sukaesih sebagai istri Wali Kota Banjar, dr. Herman Sutrisno yang menjadi calon Wali Kota Banjar 2013-2018 dari partai Golkar, mendatangkan banyak kekhawatiran dan persepsi negatif dari berbagai kalangan seperti masyarakat, lawan politik, praktisi maupun akademisi. Lawan politik akan mengaitkan kemunculan Ade Uu Sukaesih itu sebagai upaya politik dalam mempertahankan dinasti kekuasaan di Kota Banjar karena menganggap sebagai perempuan Ade Uu Sukaesih belum tentu mampu memimpin Kota Banjar

Ade Uu Sukaesih menggandeng Darmadji Prawirasetia, drg, M.Kes (untuk selanjutnya Penulis menuliskan drg. Darmadji Prawirasetia) dalam berlaga dikontes pemilihan Wali Kota Banjar pada Agustus 2013 yang lalu. Pasangan Ade Uu Sukaesih-Darmadji Prawirasetia bernomor urut 4 yang diusung Golkar, PKS, PPP, PKB, PAN, Gerindra, dan PKPI ini memperoleh suara terbanyak, 67,43% dengan tingkat partisipasi kurang lebih 75% (25% Golput). Hasil ini membuktikan bahwa rakyat masih sangat berharap roda

pembangunan Kota Banjar bisa lebih maju jika dipegang oleh istri mantan Wali Kota Banjar seperti sebelumnya saat dipegang oleh dr. Herman Sutrisno.

Kemenangan Ade Uu Sukaesih dalam Pilwalkot Kota Banjar mendatangkan banyak pertanyaan khususnya terkait kepemimpinan perempuan di daerah. Berbagai asumsi muncul terkait kemenangan Ade Uu Sukaesih sebagai wali kota Perta sepiangan timur. Terdapat beberapa faktor pendukung terhadap kemenangan Ade Uu Sukaesih dalam menduduki jabatan Wali kota Banjar seperti saat ini.

Faktor pendukung tersebut diantaranya adalah:

1. Sosok dokter Herman sebagai tokoh yang membumi di Kota Banjar yang menjabat dua kali periode Wali kota Banjar sekaligus suami dari Ade Uu Sukaesih.
2. Sosok Ade Uu Sukaesih sebagai Istri Mantan wali kota yang di anggap berhasil mendampingi dokter Herman dalam mengembangkan tugasnya selama dua periode.

Kedua faktor diatas sangat menentukan kemenangan Ade Uu Sukaesih dan apabila analisis menggunakan pendekatan gender, dapat terlihat terdapat stereotype yang muncul dalam keberhasilan Ade Uu Sukaesih. Terdapat subordinasi, dalam hal ini Ade Uu Sukaesih dianggap mampu karena tinggal meneruskan apa yang sudah dirintis oleh dokter Herman dan terkesan menganggap pemimpin hanya pantas dipegang oleh laki-laki, bahwa

perempuan hanya boleh mengikuti saja apa yang sudah ada. Arogansi laki-laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkembang secara maksimal. Perempuan tidak mampu berkembang secara maksimal karena laki-laki selalu menganggap laki-laki yang lebih kuat dan mampu melaksanakan tugas di ruang publik dibandingkan perempuan sehingga dalam kasus kemenangan Ade Uu Sukaesih sebagai Wali Kota Banjar dokter Herman tidak melepaskan kendalinya atas istrinya dan berperan dominan dalam setiap proses yang ditempuh istrinya maju menjadi wali kota berikutnya.

Herman Sutrisno selain sebagai Wali Kota Banjar pertama selama dua periode, juga merupakan ketua umum DPD Partai Golkar di Kota Banjar. Dengan kedua jabatan itu, dr Herman Sutrisno memiliki kewenangan besar dalam mengambil setiap keputusan baik sebagai Wali Kota Banjar maupun sebagai ketua partai Golkar. dan terpersonifikasi kepada diri dr Herman Sutrisno, Ketua DPD Golkar Kota Banjar.

Golkar sebagai partai terkuat dan terbesar di Kota Banjar, menjalankan mekanisme organisasi “personalinterest” yaitu dr Herman Sutrisno. Hal ini adalah salah satu indikator untuk memuluskan pencalonan istrinya, Ade UU Sukaesih sebagai calon tunggal wali kota dari Partai Golkar mengalahkan banyak kader Golkar Kota Banjar seperti Soedrajat Argadireja, H. Sudarsono, Dadang R. Kalyubi, dan Unen Astramanggala. Ketiga nama terakhir merupakan kader-kader Partai Golkar yang

kini menjadi petinggi DPD Golkar dan DPRD Kota Banjar.

Sekilas tentang peran dr Herman Sutrisno dalam proses pencalonan terlihat sangat dominan dan memegang keputusan tunggal. Awal pencalonan Ade Uu Sukaesih sudah diperhitungkan dan tidak lepas dari pengawasan Wali Kota Banjar. Dalam tahapan selanjutnya, seperti pada saat deklarasi pasangan calon, deklarasi partai koalisi sampai pawai pun tidak lepas dari pengawasan dr Herman Sutrisno sebagai suami, Wali Kota Banjar sekaligus ketua umum Partai Golkar di Kota Banjar.

Dalam berbagai peristiwa, Herman Sutrisno hadir sebagai ketua umum Partai Golkar untuk kepentingan pencalonan Ade Uu Sukaesih. Herman Sutrisno melakukan aksi-aksi simpatik seperti membagikan kartu sehat kepada warga sekitar sebagai bentuk kepedulian wali kota kepada warganya.

Serangkaian kegiatan kampanye politik Ade Uu Sukaesih juga tidak pernah lepas dari kegiatan yang selalu dihadiri oleh Wali Kota Banjar. Keberadaan Dr Herman sebagai sosok pemimpin laki-laki yang kuat semakin menegaskan adanya kultur yang selalu memenangkan laki-laki dalam setiap kontestasi dan memang telah mengakar di masyarakat. Kultur inilah yang sudah mengakar kuat didalam pemikiran rakyat Kota Banjar. Rakyat Kota Banjar memilih Ade Uu Sukaesih dikarenakan kemenangan dokter Herman selama dua periode memimpin Kota Banjar. Ada harapan pembangunan Kota Banjar lima

tahun kedepan akan sama baiknya pada saat dokter Herman menjabar sebagai wali kota selama dua periode sehingga memilih Ade Uu sama artinya dengan memilih kembali dokter Herman.

Ketidakadilan akan terjadi ketika di masa yang akan datang Ade Uu Sukesih sukses memimpin Kota Banjar, stereotipe yang muncul akan tetap memenangkan posisi dokter Herman. Suksesnya Ade Uu dalam memimpin akan dianggap tidak terlepas dari bayang-bayang kesuksesan dokter Herman saat memimpin dua kali periode jabatan Wali Kota Banjar.

Penelaahan yang lebih lanjut, sesungguhnya ada hal penting yang menopang kepemimpinan perempuan, yakni karakter femininitas yang dominan pada diri perempuan dan kedekatan perempuan pada persoalan kehidupan sehari-hari. Karakter femininitas biasanya yang terlihat adalah penyayang, sensitif, peduli, mengayomi, kerjasama, detail, teliti, sabar, dan masih banyak lagi. Karakter ini melekat pada diri Ade Uu Sukaesih dengan latar belakang karir kemasyarakatan selama dokter Herman menjabat sebagai Wali Kota Banjar. Ade Uu Sukaesih merupakan Ketua PKK Kota Banjar tahun 2004 sampai dengan sekarang. Sehingga berbagai kegiatan PKK, Posyandu dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan rakyat khususnya ibu-ibu berada dalam kendali Ade Uu Sukaesih. Karakter penyayang, sensitif, peduli, mengayomi, kerjasama, detail, teliti, sabar inilah yang menjadi bahan dasar kepemimpinan Ade Uu Sukaesih memimpin Kota Banjar.

Karakter-karakter ini sangat memungkinkan dipakai untuk mentransformasi budaya politik maskulin yang banyak mengandalkan *game power*, kompetisi, saling menjatuhkan, dan kerap menggunakan teror. Diperlukan keberanian untuk mengubah tradisi politik kepartaian yang membuat sekat-sekat pada *sisterhood* mengganti dengan budaya saling kerjasama. Akan tetapi stereotip terhadap perempuan sebagai kaum yang selalu dianggap lemah, tidak patut mengatur dan memimpin, tidak memerlukan pendidikan tinggi karena hanya akan berada di rumah, dan sebagainya itu mendegradasi dan terus menihilkan peran perempuan dalam kehidupan sosial politik dan kepemimpinan dalam masyarakat. Stereotip tentang perempuan dalam masyarakat Indonesia mendorong perempuan untuk menjadi lebih pasif dalam kehidupan publik, lebih banyak berada dalam aktifitas rumah tangga. Tantangan menjadi ganda saat stereotip seperti ini terpelihara oleh negara dengan perangkat hukum dan kebijakan yang tidak terlalu menaruh perhatian pada kaum perempuan. Di satu sisi kaum perempuan harus melawan kultur patriarkis dan di sisi lain mereka harus melawan praktek diskriminatif dalam proses politik, baik dalam lembaga-lembaga legislatif ataupun di dalam partai politik.

Simpulan

Pilkada melalui mekanisme pemilihan langsung telah membuka kesempatan bagi perempuan yang mempunyai kemampuan untuk menduduki

posisi pemegang keputusan, yaitu kepala daerah. Kota Banjar merupakan salah satu kota yang memiliki pemimpin perempuan setelah akhir dua periode masa jabatan dr. Herman Sutrisno. Dari hasil Pemilu wali kota Tahun 2013 dihasilkan kemenangan mutlak calon nomor urut 4 yaitu pasangan Ade Uu Sukaesih-Darmadji Prawirasetia dengan perolehan suara sebesar 67,43% dengan tingkat partisipasi kurang lebih 75% (25% Golput).

Hasil ini membuktikan bahwa rakyat masih sangat berharap roda pembangunan Kota Banjar bisa lebih maju jika dipegang oleh istri mantan Wali Kota Banjar seperti sebelumnya saat dipegang oleh dr. Herman Sutrisno. Kemenangan Ade Uu Sukaesih dalam Pilwalkot Kota Banjar mendatangkan banyak pertanyaan khususnya terkait kepemimpinan perempuan di daerah. Berbagai asumsi muncul terkait kemenangan Ade Uu Sukaesih sebagai wali kota perempuan pertama se-Priangan Timur.

Ade Uu Sukaesih sebagai Wali Kota Banjar diharapkan dalam kepemimpinannya selama lima tahun setelah pemilihan mampu bekerja mandiri dan percaya terhadap kemampuannya sendiri sehingga stereotype tentang ketergantungan Ade Uu Sukaesih terhadap sosok wali kota sebelumnya yang merupakan suami dari Ade Uu Sukaesih dapat dihapuskan. Selain itu Ade Uu juga harus membuktikan bahwa dibawah kepemimpinan perempuan Kota Banjar dapat menjadi kota yang lebih maju daripada sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Brata, Kusumah, dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Fakih, Mansour. 2010. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fauzia, Amelia, dkk. 2004. *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Gramedia Pustaka Utama dan PPIM UIN. Jakarta.
- Gaffar, Afan, dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin. 2001. *Paradigma Baru Otonomi Daerah*, Pusat penelitian politik LIPI. Jakarta.
- International IDEA. 2002. *Laporan Hasil Konferensi Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. IDEA. Jakarta
- Jurnal Otonomi Daerah. 2002. *Demokratisasi, Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Tantangan Nasional*. Edisi Juni.
- Jurnal Pendidikan dan Monitoring Pembangunan Otonomi Daerah. 2000. *Basis Asosiasi Lokal Untuk pembangunan Otonomi Daerah*. LP2OD-KW dan PUISUI. Jakarta. Edisi, September
- Lembaga Studi dan Advokasi Kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri. 2003. *Evaluasi dan Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Mas'udi, Masdar F. 2002. *Islam and Womens Reproductive Rigths*. Sister in Islam. Malaysia.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Mulia, Siti Musdah. 2007. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Kibar Press. Yogyakarta.
- Nugroho D, Riant. 2000. *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*. PT ELEX Media Komputindo. Jakarta.
- Sarundajang, S.H. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Saefullah, Eep. 2000. *Pengkhianatan Demokrasi A la Orde Baru*. Rosdakarya. Bandung.
- Hariti, Sastriyani Siti. 2009. *Gender and Politics*. Pusat Studi Wanita UGM dan Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Fokus Media. Bandung.
- Prof. Farida Nurland dalam <http://dwiearoem.com/2013/10/agenda-politik-perempuan-merebut-kursi-prestasi-2/diunggah> pada 20-09-2015